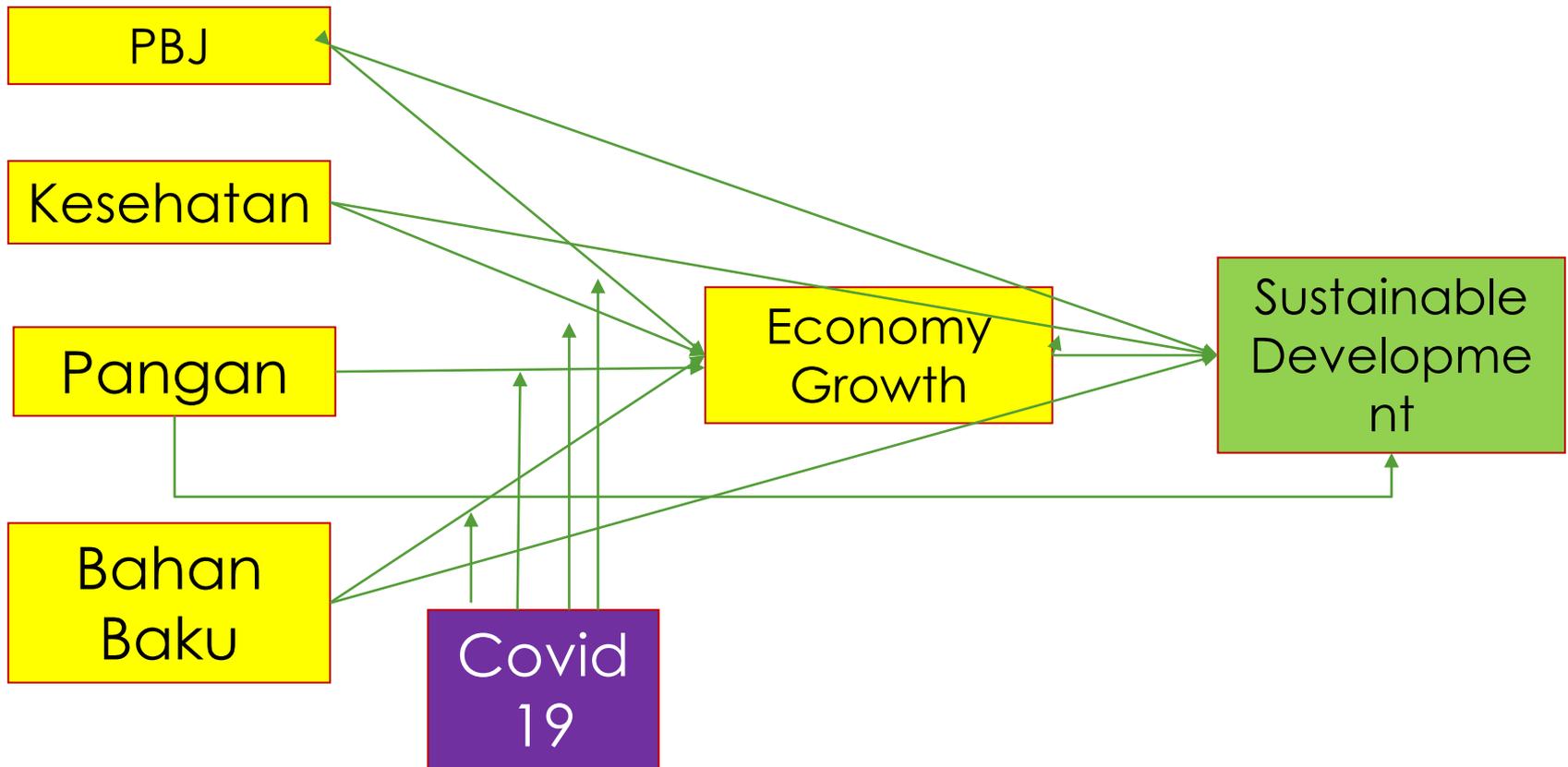


PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

New Green World

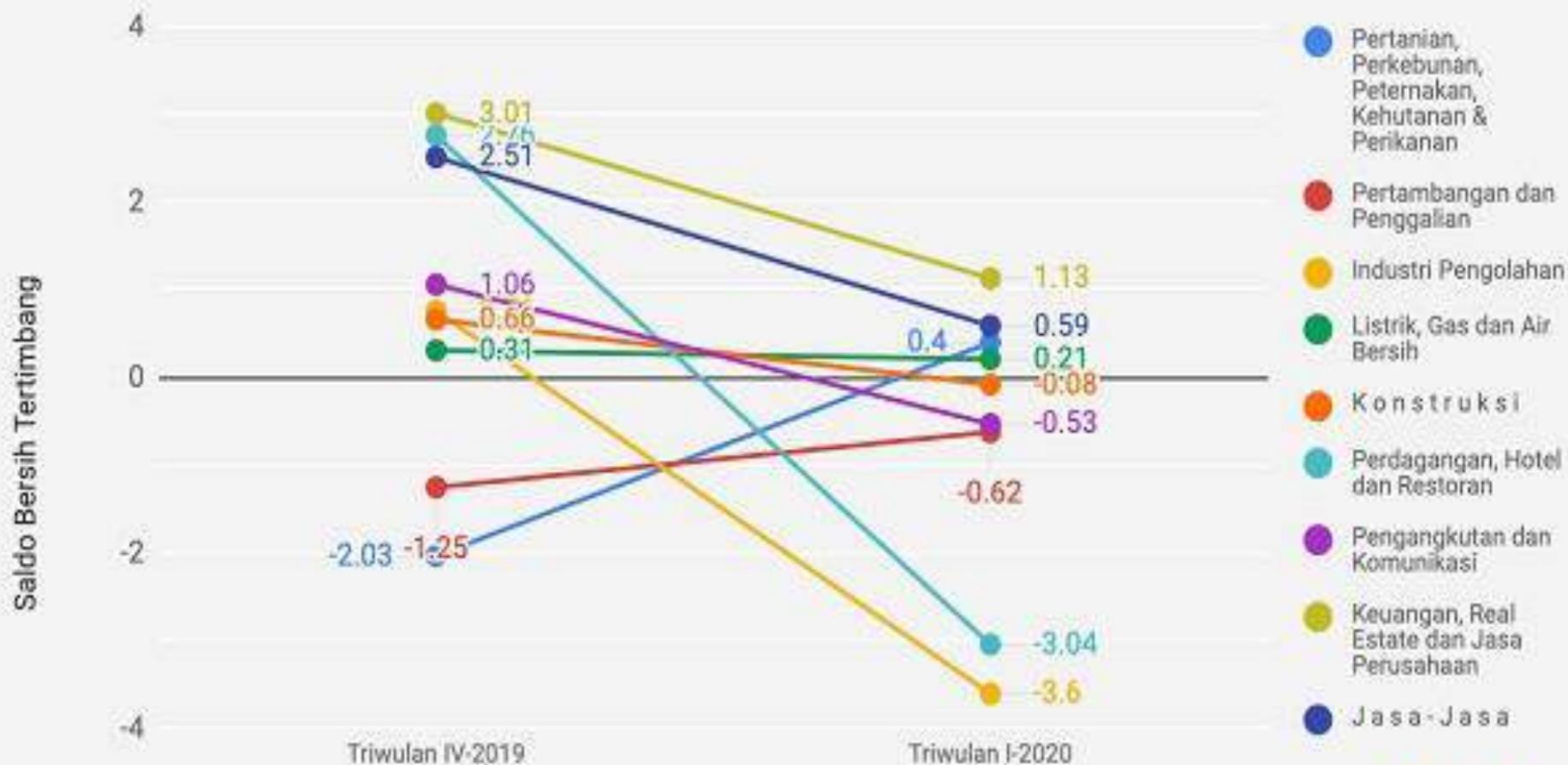


Corona Kills Everything

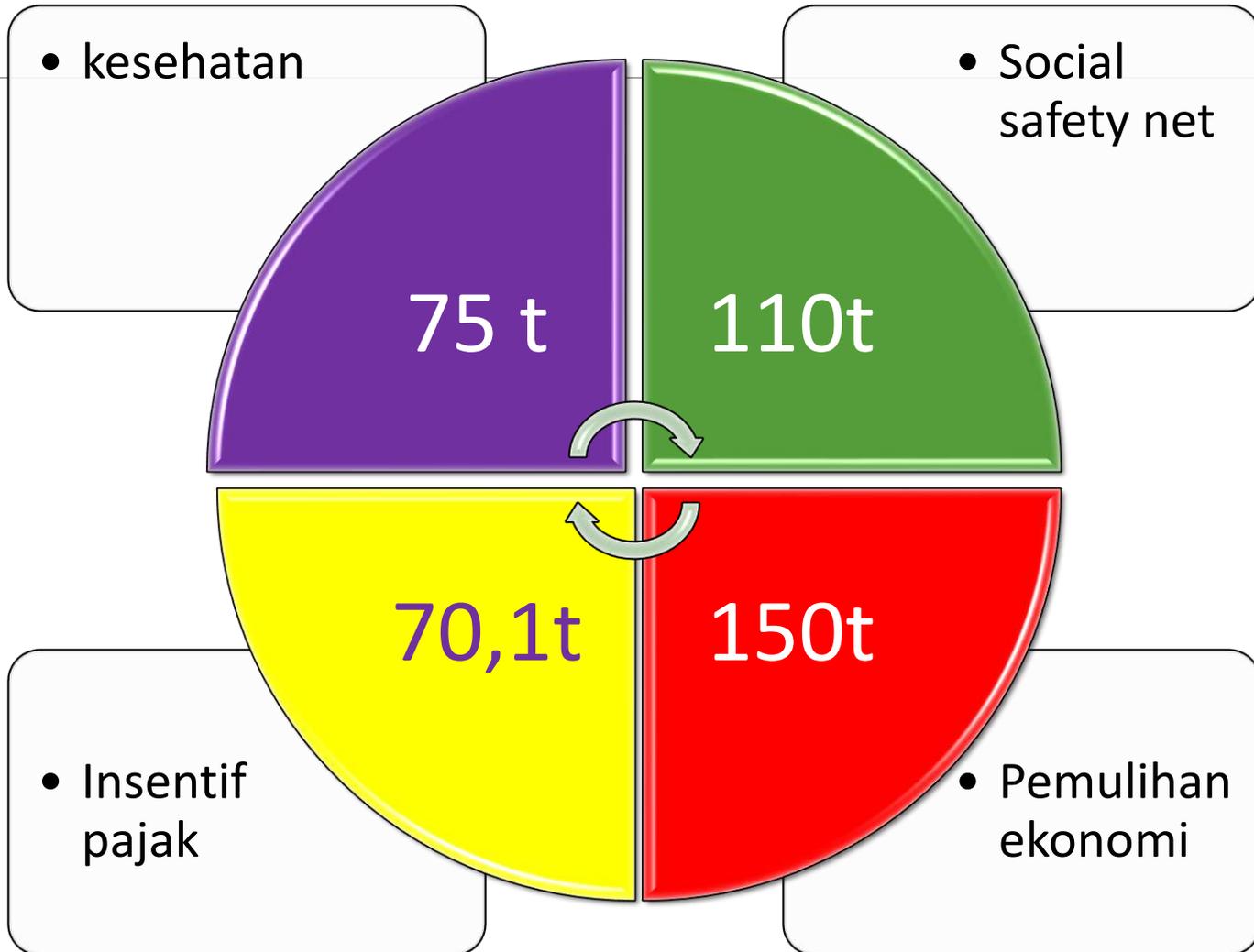
List of Product, Business & Habits Killed by COVID-19

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| #1. Handshake | #11. Car Free Day | #21. Souvenir Shop | #31. EO |
| #2. Consumer Confidence | #12. Airlines | #22. Film & TV Production | #32. Reception |
| #3. Prostitution | #13. Cruise Vacation | #23. Game Center | #33. Wedding Organizer |
| #4. Funeral | #14. Cinema | #24. Motorbike Touring | #34. Make Up Artist |
| #5. Mudik | #15. Concert & Festival | #25. Offline Restaurants | #35. Gasoline |
| #6. General Election | #16. Recreational Venues | #26. Sports Event | #36. Construction |
| #7. 9 to 5 Work Hour | #17. Travel Agent | #27. Physical Contact Sport | #37. Real Estate |
| #8. Self-Employed Workers | #18. Lodging E-Marketplace | #28. Barbershop | #38. Mall |
| #9. Taxi/Ojol | #19. Hotel & Homestay | #29. Dental Clinic | #39. Department Store |
| #10. Air Pollution | #20. Money Changer | #30. MICE | #40. Fitness Studio |

Pergerakan Kegiatan Usaha tiap Sektor



Relokasi Rp 405,1 triliun



149,3 T utk pulihkan BUMN

YANG MENDAPAT KUCURAN DANA

DANA KOMPENSASI



Rp38,25 triliun

PLN Peniadaan kenaikan tarif listrik



Rp37,83 triliun

Pertamina Peniadaan kenaikan harga minyak

DANA PENYALURAN BANSOS



Rp10,50 triliun

DANA TALANGAN



Rp8,50 triliun

Investasi nonpermanen
Kementerian Keuangan



Rp3,50 triliun

Investasi nonpermanen
Kementerian Keuangan



Rp4 triliun

Penempatan dana pemerintah
pada bank peserta



Rp3 triliun

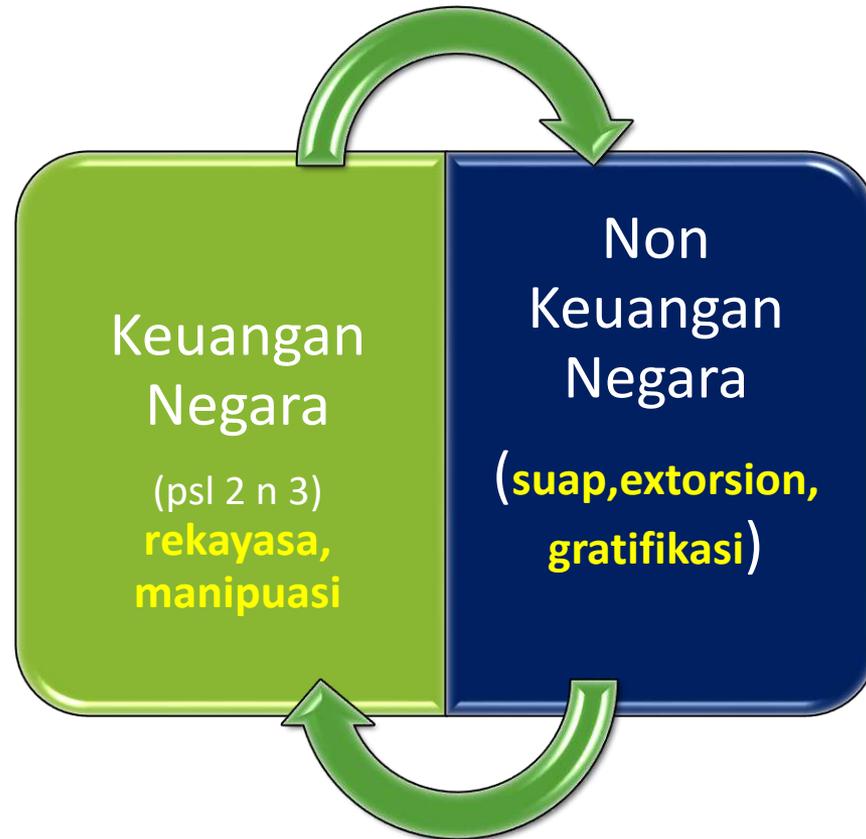
Penempatan dana pemerintah
pada bank peserta



Rp650 miliar

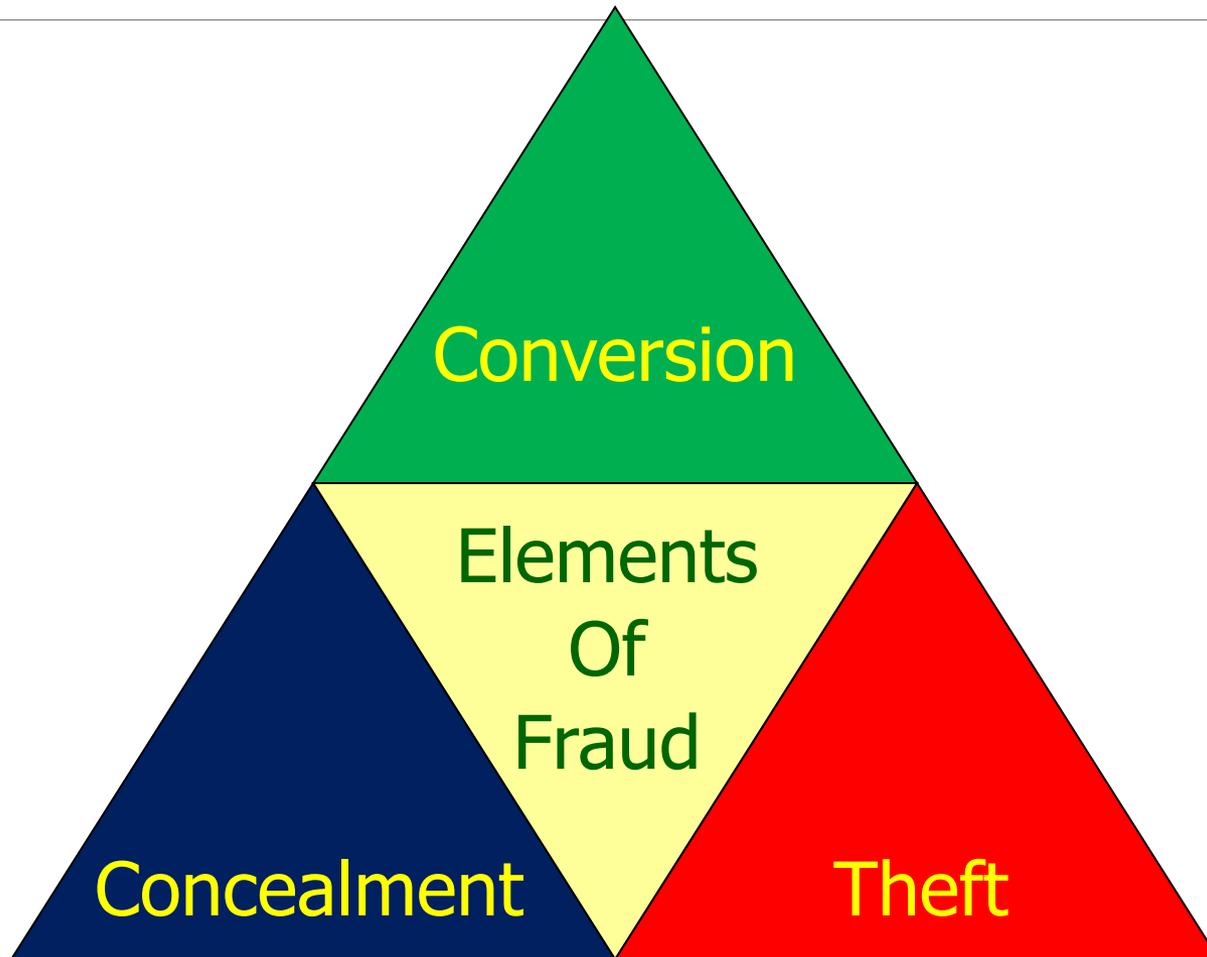
Investasi nonpermanen
Kementerian Keuangan

Potensi Korupsi/Fraud





Unsur Fraud



Bentuk Fraud



Bentuk Fraud

Antar Private

- Misappropriation of Assets..415KUHP/8 31-99
- Fraudulent Financial Rep...416KUHP/9 31-99
- Corruption

Sektor Publik

- Corruption

FRAUD STAR

Corruption The Devil (HU,2016)

Pressures

Finance
Superiors
Relatives ,etc

Opportunity

Control (env, acct, SOP)
IA
Naked emperor Phen

Rationalization

They owe me
No body will get hurt
I deserve more
Org goals

Capability

Resources
Information
Absolute power distance

Integrity

Lack of Ethics
Period of jobs



Lahir 27 Juli 1958
di Paleloan, Sulut
Warga Negara Belanda
Sejak 1979

AKHIR PELARIAN BURONAN PEMBOBOL BNI MARIA PAULINE LUMOWA

JEJAK KASUS

Oktober 2002 - Juli 2003

- Pembobolan Kas Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jaksel via L/C Fiktif
- Kucuran Pinjaman Senilai Rp 1,7 Triliun ke PT Gramarindo Group Milik Maria Pauline Lumowa & Adrian Waworuntu

Juni 2003

- BNI Curiga & Usut Transaksi Keuangan, PT Gramarindo Group Ternyata Tak Pernah Ekspor



@liputan6dotcom

BURONAN

Liputan6online

September 2003

Maria ke Singapura Sebulan Sebelum Penetapan Tersangka oleh Tim Khusus Mabes Polri

2009

Maria Berada di Belanda & Sering Bolak-Balik ke Singapura

2010 & 2014

Indonesia 2 Kali Ajukan Permohonan Ekstradisi Maria ke Belanda Permohonan Ditolak & Opsi Maria Disidang di Belanda

16 Juli 2019

Maria Ditangkap NCB Interpol Serbia di Bandara Nikola Tesla Penangkapan Sesuai Red Notice Interpol pada 22 Desember 2003

EKSTRADISI

2019 - 2020

- Kemenkumham RI Kirim Surat Permintaan Penahanan Sementara hingga Permohonan Ekstradisi Maria kepada Serbia
- Ini Timbal Balik Serbia karena Indonesia Ekstradisi Pencuri Data Nasabah Nikolo Iliev pada 2015

9 Juli 2020

- Maria Tiba di Indonesia dengan Didampingi Tim Gabungan Pimpinan Menkumham Yasonna H Laoly

Opportuniy



AKURAT.co

Kejagung Tetapkan Pejabat OJK dan 13 Perusahaan jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya

FH menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK periode Februari 2014-2017

PT DMI (sebelumnya ditulis PT DM) atau PT PAJ, PT OMI, PT PPI, PT MDI (sebelumnya ditulis PT MD) atau PT MCM. PT PAM, PT MNCAM, PT MAM, PT GAPC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TFII, dan PT SAM.

Tribunjogja.com Editor: Hari Susmayanti

8 MODUS KORUPSI DANA DESA

KERUGIAN (dalam rupiah)

PENGGELAPAN

20
KASUS



6,2
MILIAR



1,5
MILIAR

PENYALAHGUNAAN DANA



8
KASUS

MARK UP

5
KASUS



1,1
MILIAR

52
JUTA*

KEGIATAN/PROYEK FIKTIF



3
KASUS

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

5
KASUS



1,05
MILIAR

282
JUTA

LAPORAN FIKTIF



4
KASUS

SUAP

1
KASUS



126
JUTA

PENYUNATAN/PEMOTONGAN



2
KASUS

5 TITIK CELAH RAWAN KORUPSI DANA DESA

Proses perencanaan (adanya elite capture)

Proses pertanggungjawaban sebanyak dua kali (berpotensi laporan fiktif)

Proses monitoring dan evaluasi (bersifat formalitas, administrative, dan telat deteksi korupsi)



Proses pelaksanaan (berpotensi nepotisme dan tidak transparan)

Proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (berpotensi mark-up, rekayasa, dan tidak transparan)

SUMBER: TEMUAN ICW

NASKAH: SUDRAJAT | RISET: REGISTA ARRIZKY | INFOGRAFIS: FUAD HASIM



KORUP

**Dana Desa
Pake Kawin
Lagi dan
Nyalon !!**

tercyduk



Kaper News .COM

Actual, Sharp and Inspiration Citizen

NUKILAN SALAH SATU KASUS KORUPSI ASN RIAU

KORUPSI PEMBANGUNAN JALAN BATU PANJANG-PANGKALAN NYIRIH, BENGKALIS

M. Nasir diangkat Bupati Bengkalis Herliyan Saleh jadi Kadis PU Bengkalis 2013 - 2016 merangkap Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2013 - 2015.

Pada 2011, Dinas PU merencanakan proyek peningkatan beberapa jalan poros di Bengkalis dengan anggaran Rp 2,5 triliun.

PT Merangin Karya Sejati (MKS) dan PT Multi Structure (MS) menemui Ribut Susanto, orang kepercayaan Herliyan Saleh menyampaikan keduanya ingin mengerjakan proyek tersebut.

Ribut menyampaikan ke Ismail, Herliyan butuh Rp 300 juta. Beberapa hari kemudian, Ismail dan Makmur menyerahkan uang itu ke Ribut masih di hotel yang sama.

Ismail Ibrahim dan Makmur (PT MKS), Jeffry Ronald Situmorang (PT MS) dan Viktor Sitorus (PT Widya Sapta Contractor (WSC) bertemu Ribut pada Agustus 2012 di Hotel Peninsula Jakarta

Ribut Susanto sampaikan ke Herliyan dan M. Nasir. Keduanya menanggapi, perusahaan harus memberi sejumlah uang.

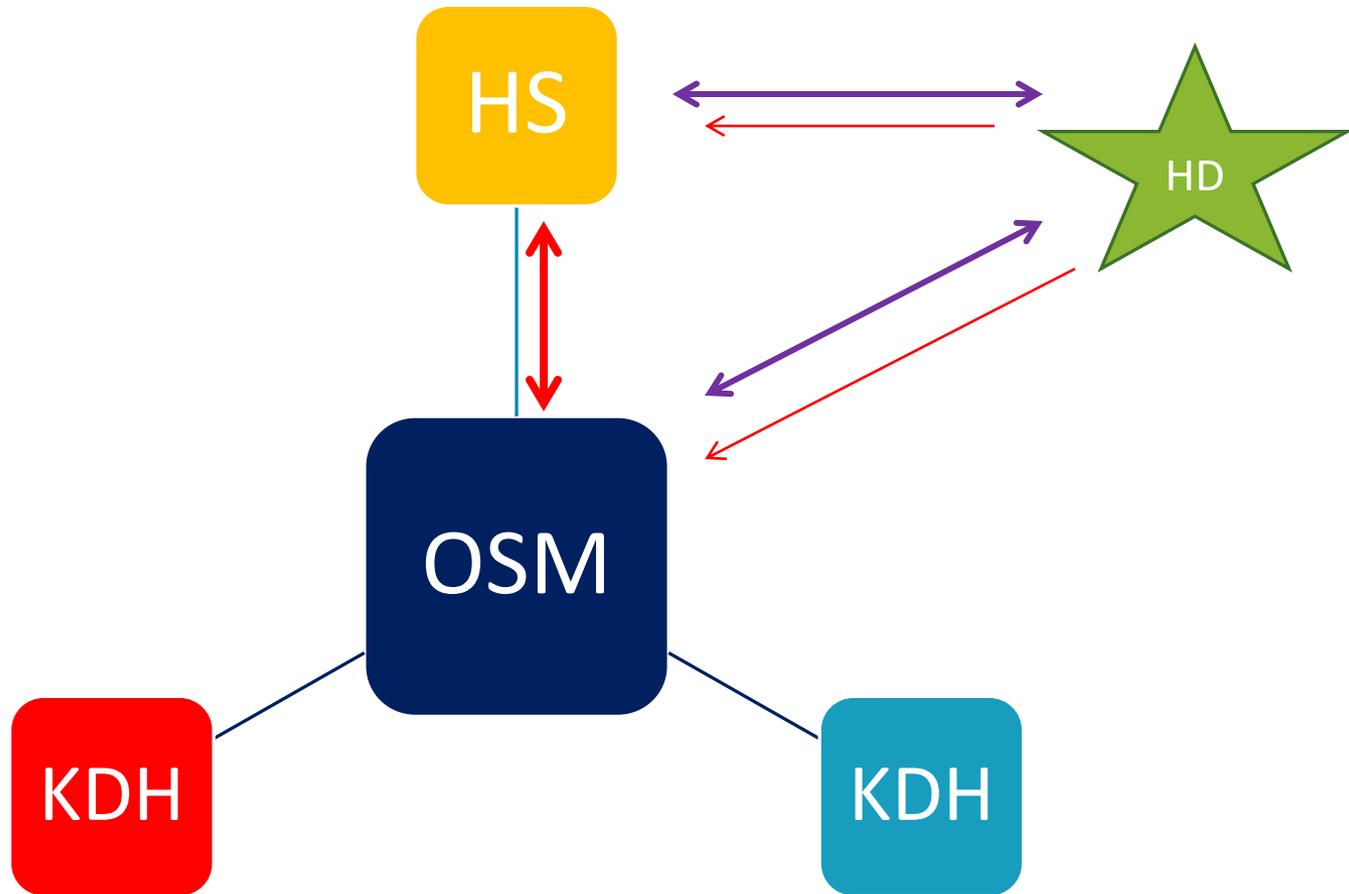
Masih di tahun yang sama, Ribut kembali sampaikan, Herliyan dan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah ingin sejumlah uang. Jeffry dan Viktor berikan Rp 4 M ke Jamal, Ismail dan Makmur berikan Rp 1 M ke Herliyan. Herliyan gunakan uang itu beli apartemen.

Mendekati proses penunjukkan, ternyata PT MKS tidak mencukupi kemampuan dasar nilai anggaran proyek. Makmur dan Ismail menemui Hobby Siregar di Jakarta. Mereka hendak pinjam PT Mawatindo Road Construction (MRC) dan Hobby setuju.

Proses kongkalingkong dan suap terus terjadi untuk memuluskan proyek ini. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru hukum M. Nasir 7 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan bayar uang pengganti Rp 2M. Sedangkan Hobby Siregar 7,6 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan bayar uang pengganti Rp 40,8 M.

Januari 2013, M. Nasir kenalkan Makmur dan Hobby ke H. Syarifuddin di rumah dinas. Nasir minta MRC dimenangkan. Selanjutnya, H. Syarifuddin bertemu para kontraktor di Hotel Marina Bengkalis dan menyerahkan harga perkiraan sementara setelah disetujui M. Nasir.

Pressures - Kasus Damkar



"TERBAKAR" KASUS DAMKAR

Tindak Pidana Korupsi penerbitan radiogram oleh Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia agar melaksanakan pengadaan mobil pemadam kebakaran milik HENGKY SAMUEL DAUD type V 80 ASM dan merk Morita dan menyetujui permohonan HENGKY SAMUEL DAUD untuk pembebasan bea masuk PPN, PPNBM dan PPh pasal 22 untuk 8 unit mobil pemadam kebakaran merk Morita yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dengan pembayaran yang bersumber dari APBD tahun 2002-2005.

RIWAYAT PUTUSAN



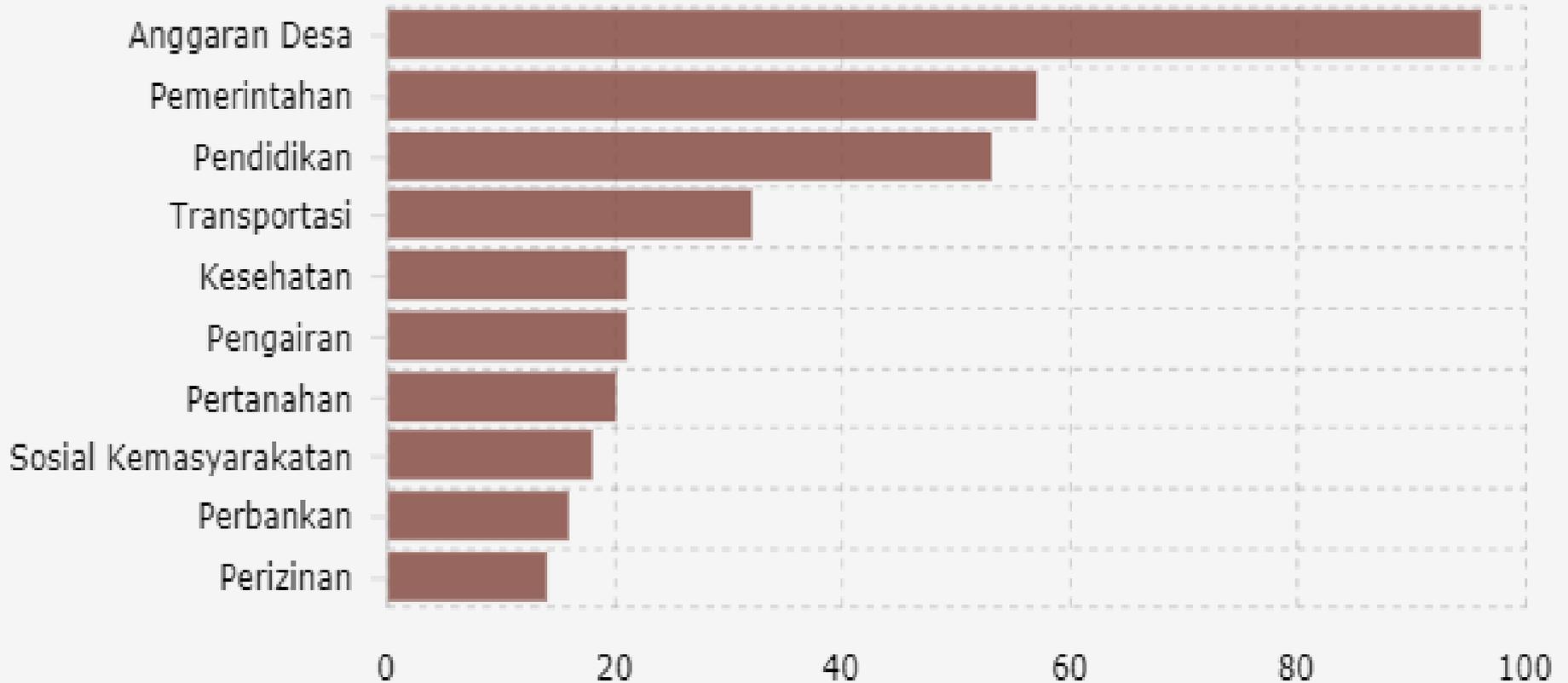
Terpidana 1:
HARI SABARNO
Menteri Dalam Negeri
periode 2001-2004



TERPIDANA

BASO AMIRUD MAULA,
Walikota Makasar
periode 1999-2004
Putusan MA: Pid
penjara 5 th, de
Rp.200jt subsid

10 Sektor Korupsi Tertinggi 2018



PEMERINTAHAN

- 1 Kepala Seksi Pengujian di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tahun 1999
- 2 Kasi Perencanaan dan Program di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim, pada 12 Februari 2001
- 3 Kabag TU Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Bontang, pada 16 Agustus 2001
- 4 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Bontang, pada 4 Desember 2001
- 5 Asisten Administrasi dan Pembangunan Pemkot Bontang, pada 30 Juni 2002
- 6 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, pada 24 Desember 2003
- 7 Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Kutai Timur, pada 23 Mei 2006
- 8 Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, pada 5 Maret 2010-2015.
- 9 Bupati Kutai Timur periode 2016 - 2021.

ISMUNANDAR

Bupati Kutai Timur,
Kalimantan Timur
(2016-2021)

Lahir
Samarinda, Kalimantan Timur, 7 Agustus 1960

Pendidikan
Lulus Universitas Merdeka Malang (Jurusan Teknik Sipil), tahun 1986
Spesialis-1 Internasional Institute Belanda Foraspace End Scinces The Nederland (Jurusan Geographic Landscape) tahun 1988
Strata 2 (S2) - Universitas Gajah Meda Yogyakarta (Jurusan Perencanaan Kota dan Daerah) Tahun 1999



Pertengahan Mei

Kamis (2/7) siang

Jumat (3/7)

Jumat (3/7) malam

Kronologi OTT

KPK mencurigai tindak tanduk Bupati Ismunandar
KPK terjunkan tim penyelidik ke Samarinda dan Sangatta.

KPK mendapat informasi dari masyarakat. Tim kemudian bergerak dan membagi menjadi 2 tim di area Jakarta, Sangatta Kutai Timur dan Samarinda.

Sekitar pukul 12.00 WIB Encek bersama Kepala Bapenda Musyaffa dan stafnya DF berkunjung ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan pencalonan Ismunandar sebagai calon Bupati Kutai Timur periode 2021-2024. Ismunandar dan ajudannya AW menyusul sekitar pukul 16.30 WIB.

Tim KPK bergerak ke FX Senayan setelah memperoleh informasi mengenai penggunaan uang yang dikumpulkan rekanan proyek sekitar pukul 18.30 WIB.

Tim mengamankan ISN, Encek, AW, dan Mus di sebuah restoran di bilangan Senayan Jakarta. Bersama empat orang lainnya.

Delapan orang yang di-OTT di Samarinda dan Kutai Timur tiba di Jakarta

Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka, lima penerima susp dan dua pemberi susp.

PENERIMA SUAP

- Ismunandar, Bupati Kutai Timur
- Ence UR Fingsah, Ketua DPRD Kutai Timur
- Musyaffa, Kepala Bapenda
- Sunansyah selaku Kepala BPKAD
- Aswandini selaku Kepala Dinas PU
- Aditya Maharani, kontraktor
- Dedy Aryanto, kontraktor

HARTA KEKAYAAN

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 17 Maret 2020 di situs <https://elhkn-pn.kpk.go.id> Total harta kekayaan **RP3.148.310.015.**

Harta tak bergerak

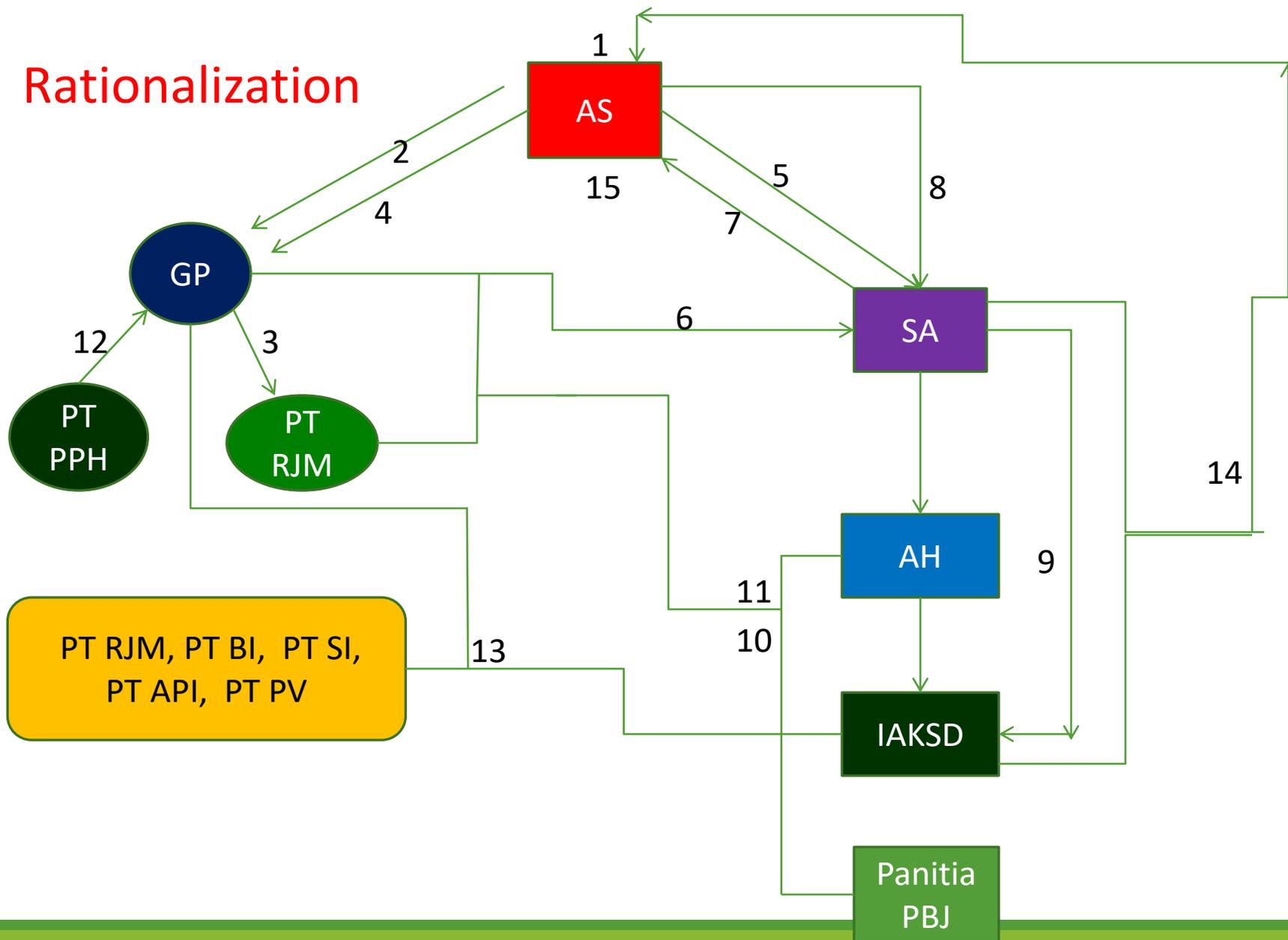
14 tanah dan bangunan senilai **RP2.934.272.000.** Lokasinya tersebar di Kutai Timur dan Samarinda.

Harta bergerak

Satu unit mobil Suzuki SB416 tahun 1997 senilai **RP40.000.000.**
Harta bergerak lainnya, senilai **RP43.000.000**
Kas dan setara kas senilai **RP131.038.015.**

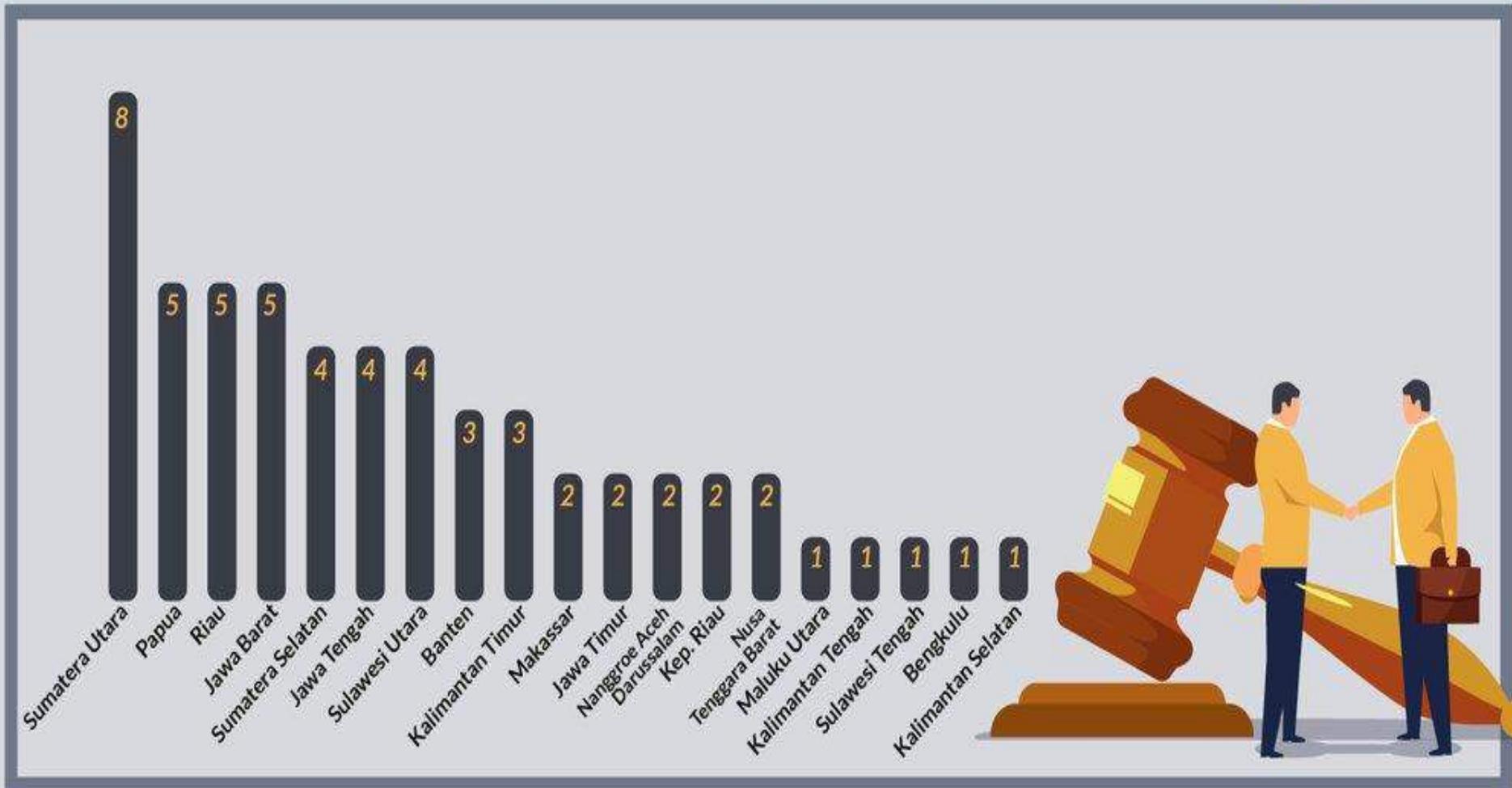
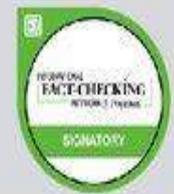


Rationalization





Tindak Pidana Korupsi Kepala Daerah Berdasarkan Provinsi



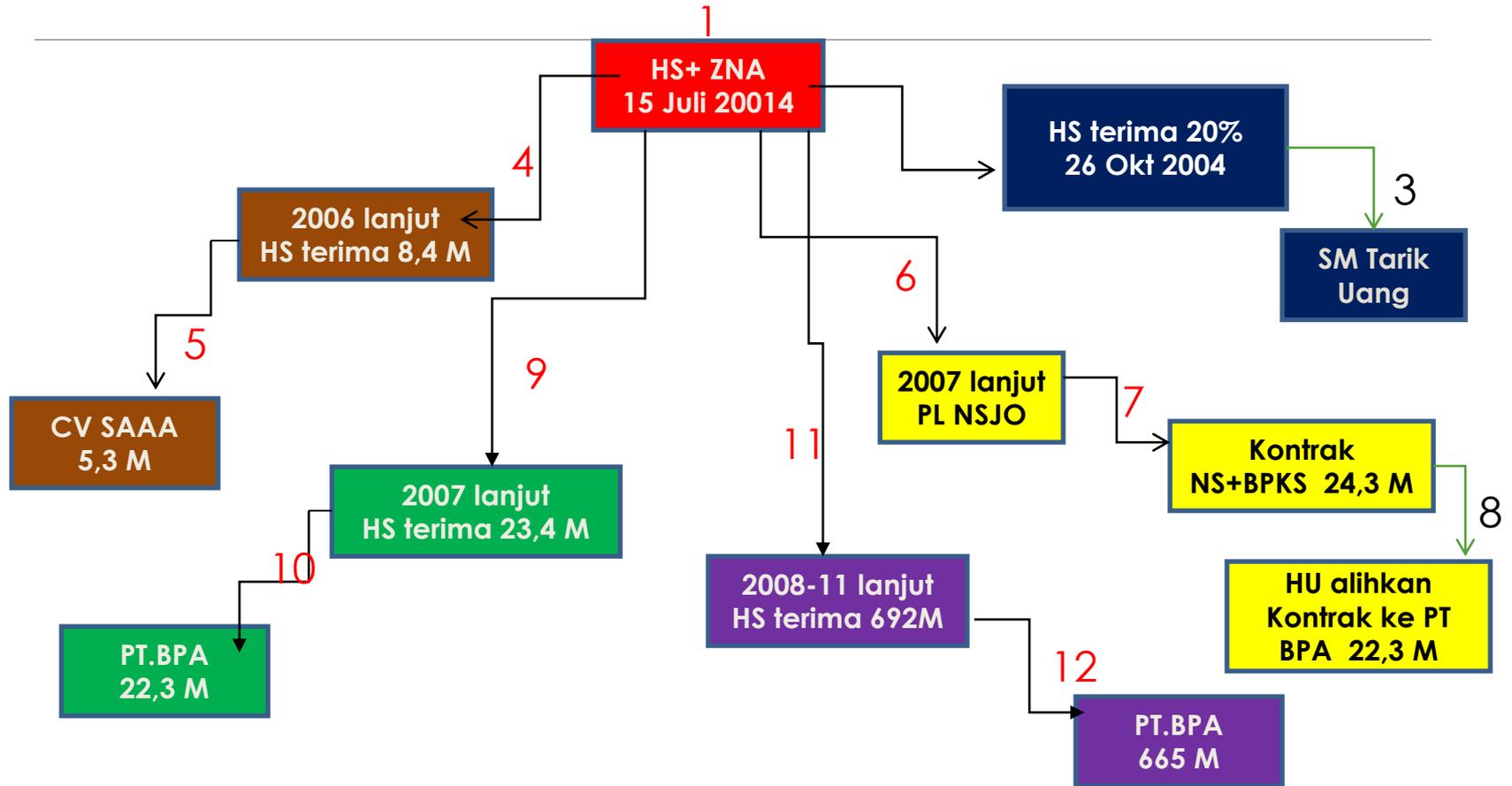
Ket.: Merupakan kasus korupsi kepala daerah yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Sumber: KPK

Infografik: Quita

Kapabilitas

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Banda Aceh.
Joint Operation (JO) antara PT NK dan PT TS



Lack Of Integrity

Lack of Integrity

Di tengah pandemi virus korona baru (Covid-19), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menetapkan seorang kepala daerah sebagai tersangka. Adapun kepala daerah tersebut yakni, KSS, seorang bupati di wilayah Provinsi Sumatera Utara

Legislator, ASN, Perantara, Kontraktor

JabarEkspres.com

DALAM BEBERAPA KASUS KORUPSI KERAP MENEMPATKAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK ATAU KORBAN. NAMUN, FAKTA BERIKUT CIKUP MENCENGANGKAN, KETIKA MENUNJUKKAN BAHWA PARA PEREMPUAN INI MENJADI PELAKU KORUPSI



2006
SYLVIA ANANDA, PNS/ Mantan Ketua Panitia Pengadaan Busway/ Mantan Kad Anak dan Penyusutan/ Terlibat Subsidi Bangor Dabub DKI Jakarta



2007
MARGARETHA ELISABETH TUTUARDINA, Pejabat Pembuat Komitmen/Kad Produksi Peningkatan Iklan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah
YONNE ANNIKE PANAMBURAN, Dirut PT. Mahakam Dasar Internasional



2008
ARTHALYA SURYANI, Swasta
HEZI WULANDARI SETYAWATI, Swasta/ Direktur PT. Gita Yelw Hutama



DARMAWATI BAREHO, PNS/Kabang TU Distrik Navigasi Tanjung Priok, Dep. Perhubungan RI



2010
KATNA DEWI UMIAR, PNS/Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI
EMELINA PATIADINA, Anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 sd 2004
RI LILY HADJARI, Anggota DPR RI Komisi IX periode 1998 sd 2004



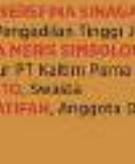
2011
MUNDU BURBARTI, Swasta
RINDO ROSALINA MANULANG, Swasta
IRAS DIANASARI, PNS/Hakim Pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung
HERENCSBI WANGUNI, Direktur Keuangan PT. Anugerah Nusantara
DIARRAMATI, Swasta
WA ODE HURHAYATI, Anggota Badan Anggaran DPR RI



2012
IRWANDA SWARAT GOELDM, PNS/Dea Pendidikan Nasional Sebagai Profesor (Dosen Universitas Indonesia)/ Mantan Deputi Gubernur Suraboi Tahun 2004-2009
WA ODE HURHAYATI, Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014
ANGELINA PATRYCKA PINGKAN SONDARI, Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014
HARTATI PURDANA, Swasta
SRI DASTUTIK, Swasta
KARITHA JULIANA H. HURHAYATI, Hakim Ad Hoc Tpkor pada PN Semarang



2013
MARIA ELIZABETH LIMAN, Swasta
DIAN SCHEDE, Pemilik PT The Master Steel
CHAEJAN BEGA, Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014
SUSI IIS ANDAYANI, Swasta
LUBITA ANE BILAK, Swasta
RATU ATIE CHORRYAH, Gubernur Prov. Banten periode 2012 - 2017



2014
WANTI SENSIPINA SINAGA, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat
ANTH MERS SIMBOLON, Presiden Direktur PT Kalim Pama Industri
RAFFITO, Swasta
NURLATIFAH, Anggota DPRD Karawang



2015
SUZARA BUDI ANTONI, Swasta
EVY SUSANTI, Swasta
LUCIANTY, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019
DEWIE RYALINDA ALS DEWIE YANIK LIPRI, Anggota DPR RI Periode 2014-2019
SIHELDA SANDOSO, Asisten Pribadi Dewa Yasin Lempu



2016
DANAYANTI NISMI PURBANTI, Anggota DPR RI
JULIA PRASETYABINI, Swasta
DESEY A EDWIN, Ibu Ruman Tongga
LENNI HILLIANS, Swasta
DEVIYANTI ROCHAYATI, Jeksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
SRI APTUTI, Komisioner CV. Temu Alam Raya
SCETHANAYALA RUDIR KASIHAN, Advokat
KOVYANTI, Sekretaris Anggota DPR RI
MEW, Witswasta

INTEGRITY.....sumber ACCH KPK

Lack of Integrity



Tindak Pidana Korupsi Kepala Daerah Berdasarkan Jenis



Ket.: Merupakan kasus korupsi kepala daerah yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Sumber: KPK

Infografik: Quita

Tindak Pidana Korupsi



Relokasi Rp 75 Trilyun

Belanja
kesehatan

- Mark-up, Mark down, fiktif
- Manipulasi, suap, gratifikasi

insentif tenaga
kesehatan

- Jumlah penerima/diterima
- Kickback, suap, pemerasan

APD bagi seluruh
132 rumah sakit
rujukan.

- Mark-up, Mark down, fiktif
- Manipulasi, suap, gratifikasi

Relokasi Rp 110 Trilyun

PKH

- Mark-up, Mark down, fiktif
- Manipulasi, suap, gratifikasi

Kartu Sembako

- Jumlah penerima/diterima
- Kickback, suap, pemerasan, gratifikasi

Prakerja.

- Rekrayasa: Mark-up, Mark down, fiktif
- Manipulasi, suap, gratifikasi

Tagihan listerik

- Rekrayasa: Mark-up, Mark down, fiktif
- Manipulasi, suap, gratifikasi

Sembako utk PSBB

- Rekrayasa: Mark-up, Mark down, fiktif
- Manipulasi, suap, gratifikasi

Relokasi Rp 70,1 Trilyun

Dunia Usaha

- Mark-up, Mark down, fiktif
- Manipulasi, suap, gratifikasi

Penundaan Bayar Cicilan KUR & Mikro

- Jumlah penerima/diterima
- Kickback, suap, pemerasan

Penundaan Bayar Kredit UKM.

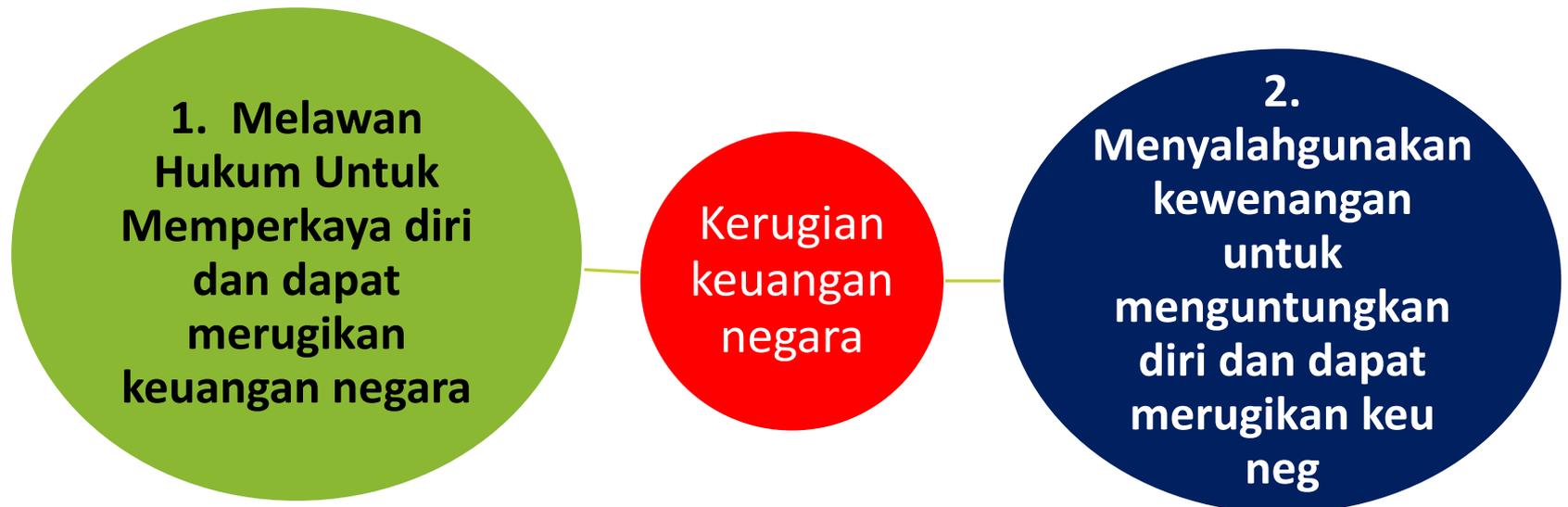
- Mark-up, Mark down, fiktif
- Manipulasi, suap, gratifikasi

Tarif Pajak dr 25% ke 22%

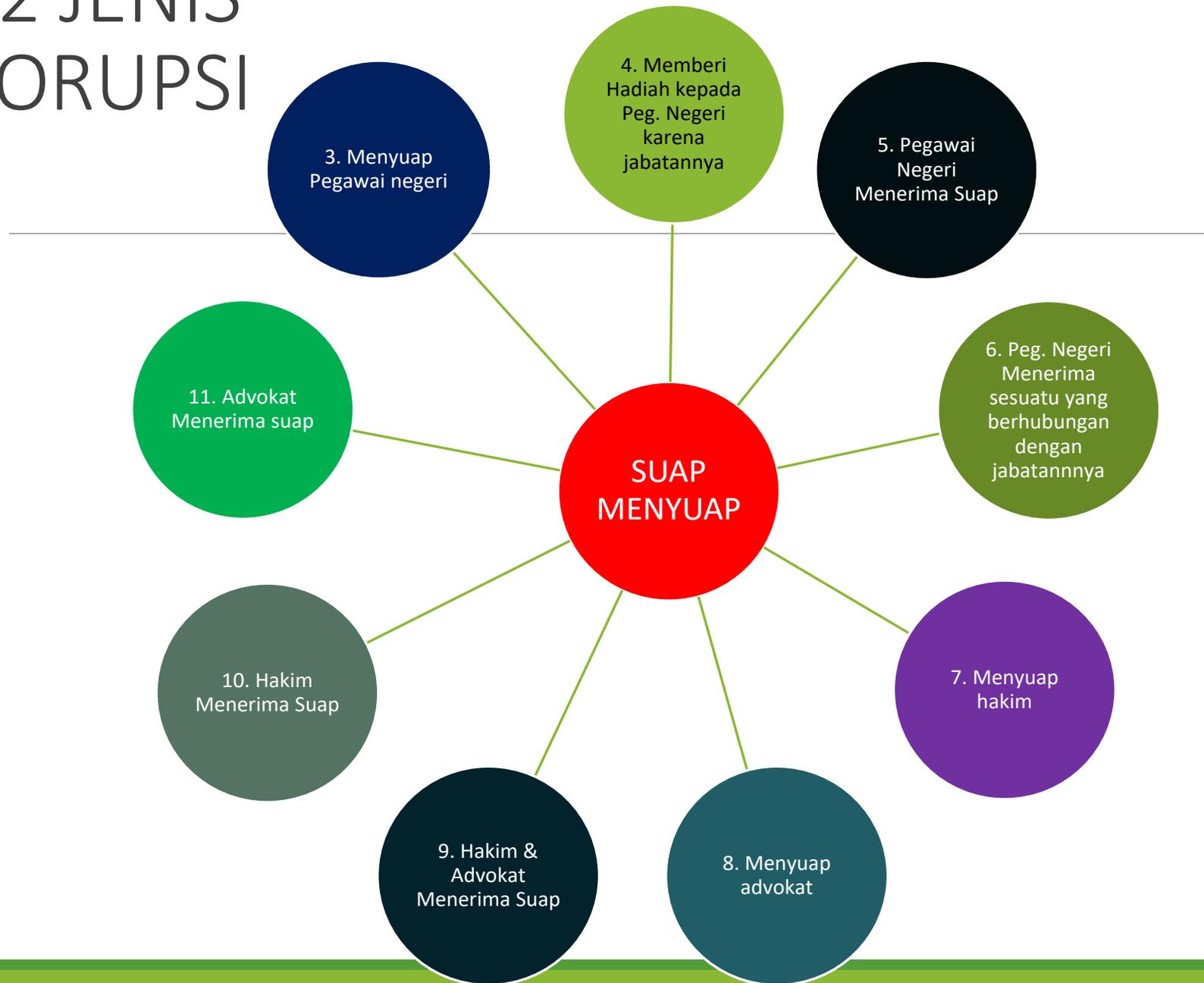
- Mark-up, Mark down, fiktif
- Manipulasi, suap, gratifikasi

32 JENIS KORUPSI

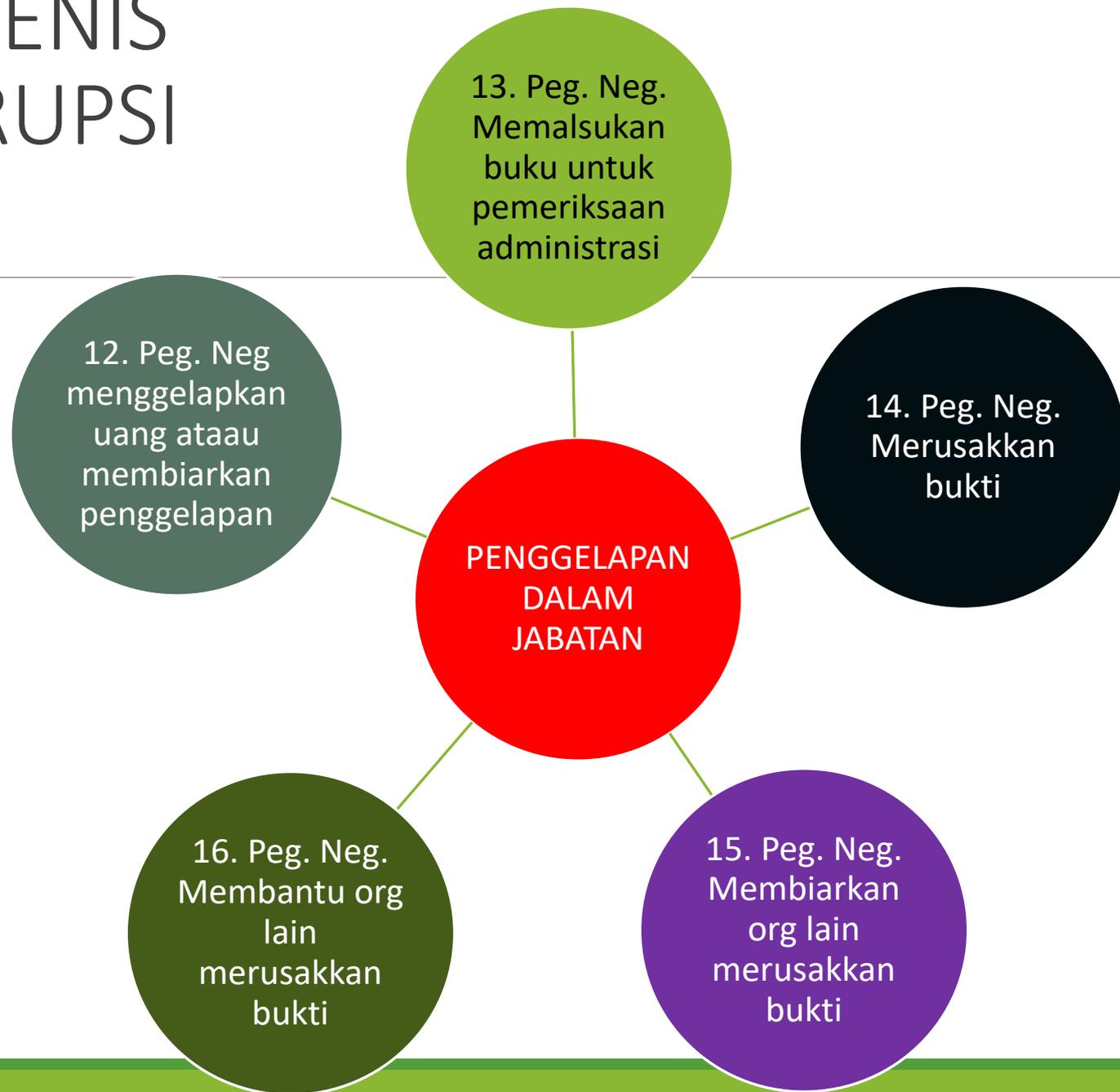
Sumber : Memahami untuk membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, KPK, 2006



32 JENIS KORUPSI



32 JENIS KORUPSI



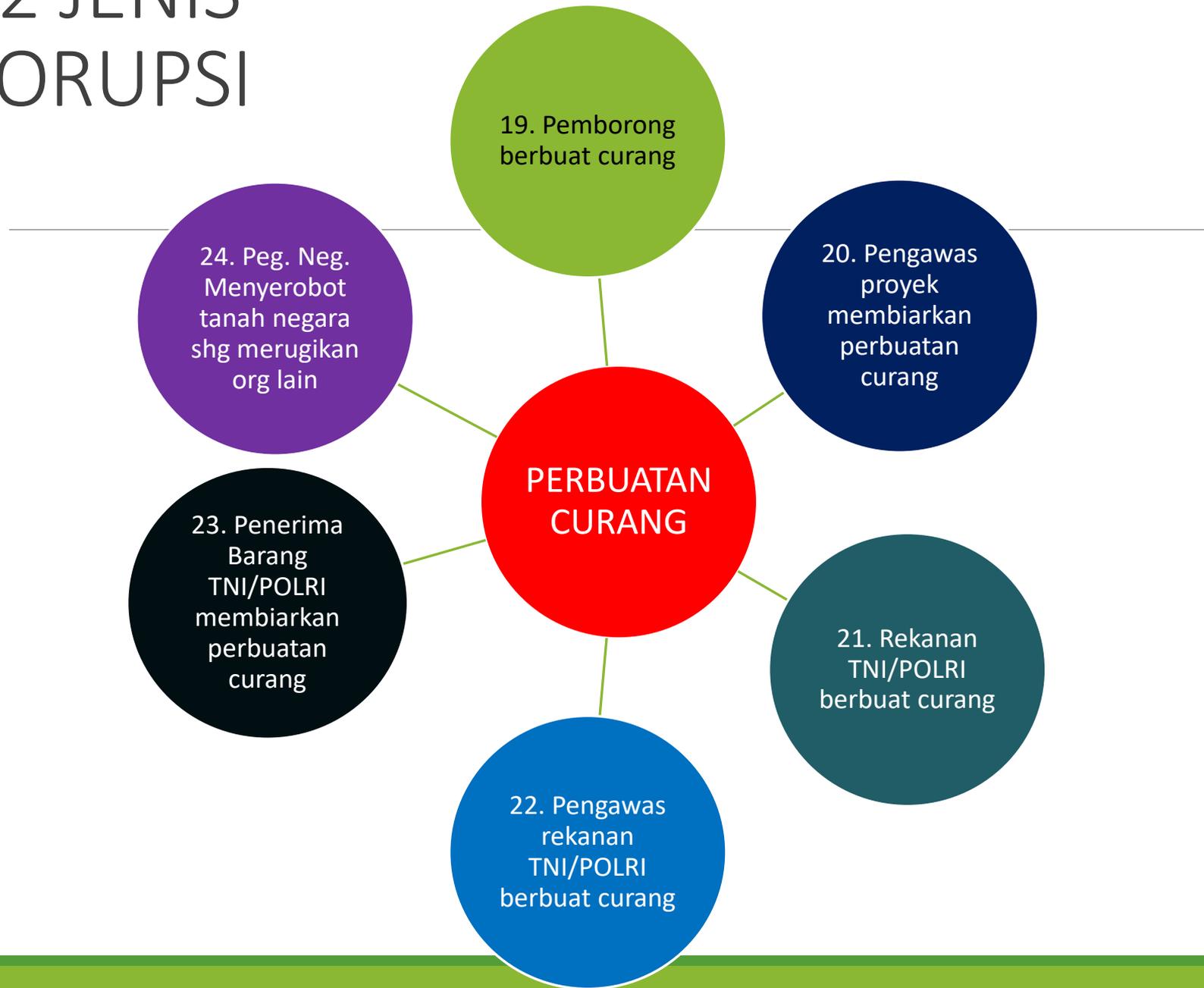
32 JENIS KORUPSI

17. Peg. Neg.
memeras

PERBUATAN
PEMERASAN

18. Peg. Neg.
Memeras
peg.neg yang
lain

32 JENIS KORUPSI



32 JENIS KORUPSI

**BENTURAN
KEPENTINGAN
DALAM
PENGADAAN**

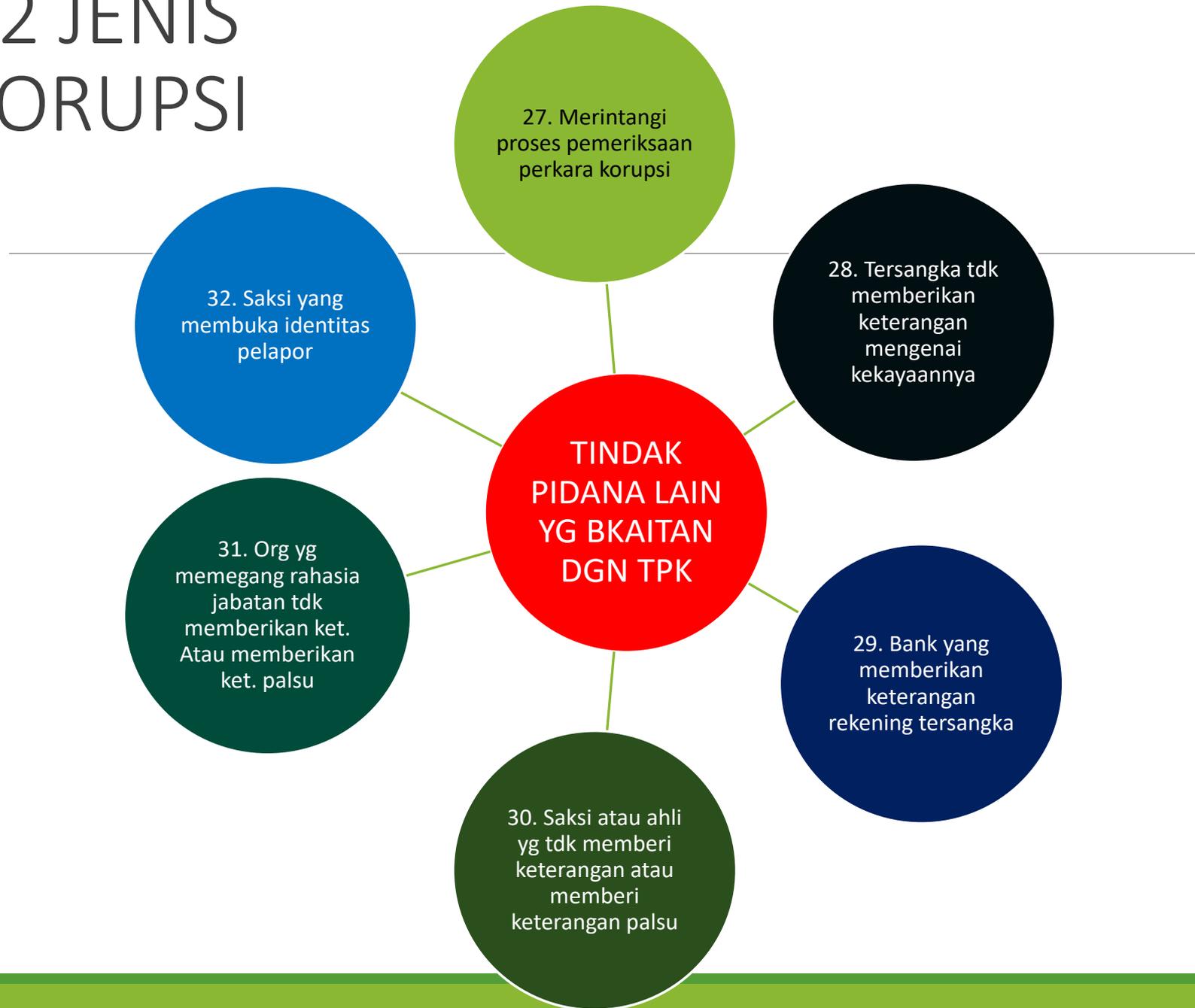
25. Peg. Neg.
Turut serta
dalam
pengadaan
yang diurusnya

32 JENIS KORUPSI

GRATIFIKASI

26. Peg. Neg.
Menerima
gratifikasi
dan tidak
lapor KPK

32 JENIS KORUPSI



HU Model

$$Y = -2,106 + 0,177X_1 + 0,089X_2 + 0,038 X_3 + 0,017X_4 + 0,821X_5$$

Dimana ;

- Y = Deteksi Korupsi (*Corruption Detection*)
- X1 = Tekanan (*Pressure*)
- X2 = Kesempatan (*Opportunity*)
- X3 = Pembenaran (*Rationalization*)
- X4 = Kemampuan (*Capability*)
- X5 = Kehilangan Integritas (*Lack Of Integrity*)

How to Handle

Peran kita Dalam Pencegahan dan Pendeteksian TPK Penangan Covid 19



Perdalam Knowledge Mengenai Korupsi secara mendalam baik secara akuntansi, ekonomi, hukum dan filosofi....**Corruption the Devil (2016, 2017)**



Meningkatkan Keterampilan untuk mengaudit-...**Audit Forensik Lawan Korupsi (2019)**



Ikut kontribusi untuk mencegah melalui kemampuan mendeteksi korupsi....**Detecting Corruption-HU Model (2020)**

Terima Kasih

PLEASE FEEL FREE TO CONTACT ME IF YOU NEED
MORE EXPLANATION

A solid green horizontal bar at the bottom of the slide.